



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI : <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4142>

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DI KABUPATEN PEMALANG

Nera Lutfyani Ulfa¹, Denok Kurniasih², Tobirin³

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-Administrasi Publik, Universitas

Jenderal Soedirman Purwokerto^{1,2,3}

lutfyaninera@gmail.com, denok.kurniasih@unsoed.ac.id,

tobirin@unsoed.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 12 November 2023

Revised date: 15 November 2023

Accepted date: 14 November 2023

ABSTRACT

The government strives to realize good governance. One way to do this is by issuing a bureaucratic simplification policy. This policy is implemented through simplifying the structure of Regional Apparatus Organizations (OPD). The purpose of this research The purpose of this research is to analyze the OPD simplification policy of the regional government of Pemalang Regency. This research uses a qualitative descriptive research method with a case study approach with dimensions based on Edward III's theory, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of this research using a study of the effectiveness of the organizational structure simplification policy in the Regional Government of Pemalang Regency have gone according to expectations, despite experiencing several obstacles. To support the effectiveness of simplifying the organizational structure within the regional government of Pemalang Regency, suggestions can be given regarding the availability of human resources needed to support the policy so that it runs more effectively.

Keywords: Effectiveness, Policy, Simplification.

ABSTRAKSI

Pemerintah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan cara mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyederhanaan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan dari penelitian ini Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kebijakan penyederhanaan OPD pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan dimensi berdasarkan pada teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menggunakan kajian evektifitas kebijakan penyederhanaan struktur organisasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah berjalan sesuai harapan, meskipun mengalami beberapa kendala. Untuk mendukung efektivitas penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang, saran dapat diberikan ialah pada bagian ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan tersebut agar berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan, Penyederhanaan.

PENDAHULUAN

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mempercepat tercapainya *good governance*, ialah dilakukannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Nisa et al., 2022). Reformasi birokrasi adalah salah satu perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik profesional berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Pemerintah telah mengeluarkan (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun, 2010) dengan tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, serta peningkatan pelayanan publik. Salah satu cara untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui program reformasi birokrasi pada unit kerja. Fokus pembenahan dan prioritas instansi pemerintah saat ini adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima untuk meningkatkan kepercayaan publik. (Pongdatu et al., 2023).

Pemerintah telah berkomitmen dan konsisten untuk melakukan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi baik di instansi pusat maupun di instansi daerah (Rusliandy, 2022). Penyederhanaan birokrasi ialah hal penting bagi pemerintah, karena hal tersebut merupakan langkah guna mempercepat pengambilan keputusan dan pelayanan kepada publik dalam berbagai bidang. Penyederhanaan birokrasi memiliki tujuan guna menjawab tantangan global pada saat ini (Dewi et al., 2022). Sebuah pemerintahan terdapat sumber daya manusia (SDM) yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyederhanaan ini menuntut ASN untuk bisa bekerja lebih secara cepat, baik, adaptif serta inovatif (Wastuhana & Werdiningsih, 2021).

Penyederhanaan birokrasi juga dilaksanakan guna mengatasi masalah kelemahan pada sistem birokrasi di Indonesia. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintahan, sehingga memudahkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang lebih baik. Penyederhanaan struktur organisasi dimaksudkan guna melakukan perubahan dalam model struktur organisasi agar memperbaiki orientasi budaya kerja para birokrasi dan meminimalisir terjadinya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) (Pongdatu et al., 2023).

Kebijakan penyederhanaan birokrasi bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi publik, yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat (Rusliandy, 2022). Terkait hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) mengeluarkan surat edaran (SE) tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) (Setiawan et al., 2022). Hal tersebut didasarkan pada jika semakin panjang hierarki dalam suatu pemerintahan, dikhawatirkan akan semakin memperbesar munculnya tindak penyelewengan kekuasaan yang bersifat koruptif (Faiz et al., 2020). Penyederhanaan birokrasi ini berupa tindakan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, melalui penyesuaian ke dalam jabatan fungsional yang setara. Tahapan dari penyederhanaan birokrasi ini dimulai dengan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja (Bramantyo & Mardjoeki, 2020).

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan mengenai penyusunan model penyederhanaan struktur organisasi sebagai bahan pertimbangan dan rujukan serta memberi kemudahan, kepastian dan kejelasan kebijakan tentang pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, 2021)

Untuk mendukung program penyederhanaan birokrasi yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi, pemerintah Kabupaten Pematang melakukan penyesuaian jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dalam hal ini memiliki kekhususan, yaitu dengan mengesampingkan syarat jabatan atau kualifikasi pendidikan yang sudah diatur dalam masing-masing oleh Instansi Pembina dari jabatan fungsional tersebut. Penyederhanaan birokrasi penting dilakukan sebagai sebuah ikhtiar untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dengan layanan publik yang semakin prima dan sejumlah argumen lainnya. Akan tetapi, proses penyederhanaan birokrasi di daerah tidak sederhana yang dibayangkan. Sehingga penelitian mengenai efektivitas kebijakan penyederhanaan struktur Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Kabupaten Pemalang perlu dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Kebijakan

Efektivitas ialah tingkat dari sebuah sistem sosial dalam mencapai tujuannya. Efektivitas juga sebagai kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu hal dikatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (Mawuntu, *et al.*, 2022).

Kebijakan publik ialah suatu rangkaian pilihan yang berhubungan dan dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan dan lain-lain. Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat yang bisa diramalkan (Nurdin dan Amelia, 2019).

Kebijakan publik adalah dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan sebagai solusi untuk mengatasi suatu persoalan publik yang bersifat mengatur. Efektivitas kebijakan merupakan pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut atau tidak (Mayasoni, 2022).

Teori efektivitas kebijakan publik oleh George C. Edwards III yang terdiri dari (Roring, 2021): (1) Komunikasi (2) Sumberdaya, merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. (3) Disposisi merupakan watak dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. (4) Struktur Birokrasi atau organisasi.

Penyederhanaan Birokrasi

1. Birokrasi ialah organisasi dalam pemerintahan yang merupakan rantai administrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan itu sendiri, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Organisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan, harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan dalam organisasi tersebut dengan kata lain birokrasi yang baik harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan (Setiawan, *et al.*, 2022). Kebijakan penyederhanaan struktur tersebut dapat menghasilkan struktur organisasi pemerintahan

yang lebih ramping dan memangkas kebuntuan birokrasi (Abdussamad, 2020).

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif. Pemilihan metode ini merupakan usaha untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang hendak dipecahkan (Cresswell, 2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen perundangan dan dokumen terkait lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan tahapan: (1) Reduksi data: dilakukan dengan merangkum data, (2) Penyajian data: dilakukan dengan uraian singkat, bagan, (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyederhanaan struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan sesuai dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana terdapat 42 Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terkena penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui jika terdapat 631 jabatan pengawas disederhanakan menjadi 179 pejabat pengawas yang akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional termasuk 3 Jabatan Administrator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adanya tersebut, membuat perubahan pada struktur OPD Kabupaten Pemalang, dimana diketahui bahwa pada jabatan pengawas (eselon IV) telah disetarakan menjadi jabatan fungsional. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat mempunyai standar minimal yang efektif, proporsional dan responsif (Dunn, 2017).

Proses kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dimulai dari perumusan hingga penetapan kebijakan. Adapun elemen-elemen yang terlibat ialah Badan Legislatif dimana seluruh Anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terlibat secara langsung dalam proses kebijakan penyederhanaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Efektivitas Kebijakan Penyederhanaan OPD Kabupaten Pemalang

No	Jenis	Formasi (orang)	Kekosongan (orang)
1	Eselon IIa	1	0
2	Eselon IIb	32	10
3	Eselon IIIa	55	11
4	Eselon IIIb	91	10
5	Eselon IVa	355	43
6	Eselon IVb	97	19

1. Komunikasi

Komunikasi dalam suatu kebijakan merupakan suatu proses penyampaian informasi kebijakan yang diperlukan suatu proses penyampaian informasi secara konsisten serta jelas. Pada penelitian yang dilakukan ini komunikasi terdiri dari keputusan-keputusan kebijakan tentang penyederhanaan struktur organisasi di OPD Kabupaten Pemalang dalam rangka untuk penyederhanaan birokrasi yang dijalankan sesuai dengan petunjuk pelaksana. Proses komunikasi dilakukan secara formal dalam rapat dan nonformal yaitu perintah langsung dari pimpinan kepada bawahan sedangkan komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang terjadi antara pemerintah dalam hal ini sekretariat daerah dan pejabat-pejabat di unit pelaksana yang berada di OPD Kabupaten Pemalang. Konsistensi informasi dibutuhkan agar kebijakan yang diambil tidak membingungkan para pelaksana kebijakan serta sasaran kebijakan di mana Informasi yang disampaikan untuk melaksanakan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas. Pelaksanaan komunikasi informasi tentang penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui sekretariat daerah khususnya biro organisasi melalui OPD untuk selanjutnya disosialisasikan.

2. Sumber Daya

Pada penelitian ini lebih berfokus pada sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas pekerjaan serta inovatif yang dapat ditimbulkan dari sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengeksekusi pekerjaan khususnya dalam bidang pelayanan publik. SDM yang dibutuhkan ialah SDM yang mampu bertanggung jawab terhadap tuntutan pekerjaan yang diberikan serta memiliki sikap positif dalam bekerja. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan harus memiliki wewenang formal agar dapat

menjalankan tugas dengan baik. Keterbatasan adanya SDM di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Jabatan pada OPD Kabupaten Pemalang

Berdasarkan hasil tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pemalang, memiliki ASN terbatas, atau masih memiliki kemampuan sumber daya manusia masih terbatas, sehingga belum bisa menyelesaikan tugas dan fungsinya berdasarkan jabatan yang diberi.

3. Disposisi

Disposisi menjadi suatu langkah atau kemauan dan kecenderungan pelaku dalam rangka untuk mengeksekusi kebijakan yang telah ditentukan atau telah dibuat yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh yang bertujuan agar dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Aspek faktor disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari proses pengangkatan dan pemilihan personil sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan tentang penyederhanaan struktur organisasi Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditarik kesimpulan bahwa melalui indikator atau aspek disposisi, biro organisasi menyampaikan tentang adanya penyederhanaan struktur organisasi dengan cara mengumpulkan SKPD akan tetapi proses tersebut tidak memberikan informasi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi.

4. Struktur Birokrasi I

Efektivitas kebijakan penyederhanaan struktur organisasi Kabupaten Pemalang didasarkan pada peraturan menteri PAN RB No. 25 tahun 2021 di mana dalam Permenpan tersebut diatur langkah-langkah atau tahapan dalam penyederhanaan struktur organisasi yang dimulai dari proses pemetaan sampai dengan tahapan pengajuan dan pemetaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan struktur organisasi merupakan tahap awal dari penyederhanaan birokrasi dalam merampingkan serta mengefisiensikan birokrasi menjadi lebih baik, namun sumber daya manusia (SDM) yang terbatas,

menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2020). *Cakrawala Pelayanan Publik di Negara Dunia Ketiga*. CV Sah Media..
- Bramantyo, A., & Mardjoeki. (2020). Urgensi Penyederhanaan Birokrasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Cresweel, J. W. (2017). Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset. *International Journal of Physiology*, 3(1), 674.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Faiz, A., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2020). Sistem Merit pada Sektor Pemerintahan: Proses Pengisian dan Penempatan Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah. *Perspektif*, 9(2), 406-417
- Mayasoni, L. (2022) Methods of Measuring the Effectiveness of Public Policy. *Jurnal Sosial Politik Integratif* 2 (3), 169-175.
- Mawuntu, P., Rares, J., Plangiten, N., (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 Di Desa Warembungan. *Jurnal Administrasi Publik* 8(113), 107-118.
- Nisa, LS., Setyati, S., Maliani. Siska, D., Fitriyanti, S. (2022). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17 (2), 167-184.
- Nurdin, I. dan Amelia E. R. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Jurnal Media Birokrasi*, 1(1).
- Pongdatu, K. A. T., Waworundeng, W., Niode, B. (2023). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Edunomika* 7(2), 1-16.
- Roring, A.D. Mantiri, M. S., Lopian, M. T. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governanace* 1(2), 1-11.
- Rusliandy, R. (2022). Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 53-70.
- Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Terapan Pemerintahan* Minangkabau, 2(1).
- Wastuhana, Y., & Werdiningsih, R. (2021). Reformasi Birokrasi Era Informasi Teknologi. *Jurnal Media Admnistrasi*, 3(1)

